OMBUDSMAN NTT DORONG PERANGKAT DAERAH SEGERA BENAHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Selasa, 10 November 2026 - ntt

Kupang, nttbacarita.com- “Setiap perangkat daerah yang menjadi objek penilaian Ombudsman diharapkan segera melakukan perbaikan untuk memenuhi standar pelayanan publik”

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Rabu, (4/11) saat menerima kunjungan dari Bidang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Malaka yang dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka, Modesta Yunensis Asa Asit, S.STP., M.Trlp., didampingi Pranata Komputer Ahli Pertama, Tukul Hariyanto, S.Kom., dan Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Maria AY Nahak, SH, bersama Ernesto Pakaeoni, SH, kunjungan yang dilaksanakan sebagai upaya ulasan evaluasi hasil penilaian Opini Ombudsman RI tahun 2026 ini diterima secara langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Yosua P. Karbeka, SH, MH, didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan, Alberth R. Kota, S.Si., M.Si.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Bidang Organisasi Pemerintah Kab. Malaka dalam menanggapi penilaian maladministrasi penyelenggaran pelayanan publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka. “Kami patut menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Bidang Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam merespon penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintahan kabupaten Malaka,” ujar Yosua.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT itu, menyampaikan bahwa Ombudsman NTT berharap agar setiap perangkat daerah yang menjadi objek penilaian Ombudsman untuk segera melakukan perbaikan untuk menyediakan standar pelayanan publik termasuk indikator pelayanan publik yang sesuai dengan indikator yang menjadi penilaian Ombudsman agar di tahun 2027 pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan semakin optimal sehingga hasil penilaian maladministrasi di Kabupaten Malaka diharapkan dapat menjadi lebih baik bahkan mendapatkan peringkat tertinggi.

Menangapi hal tersebut, Plt. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka, Modesta Yunensis Asa Asit, S.STP., M.Trlp., menyampaikan bahwa hasil penilaian Opini Ombudsman tahun 2026 ini akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di mencakup pemerintah Kabupaten Malaka. “Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2026 ini akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Malaka,” Pungkasnya.

Adapun Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2026 ini mencakup 4 (empat) dimensi antara lain, input yang mencakup kesiapan dan kapasitas dasar yang dimiliki oleh instansi atau unit penyelenggara layanan sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimensi proses mencakup bagaimana pelayanan publik dilaksanakan secara riil dan apakah sudah memenuhi standar yang diwajibkan secara hukum, dimensi output mencakup fokus pada hasil akhir dari pelayanan yang diterima oleh masyarakat hingga dimensi pengaduannya yang mengukur kemampuan dan komitmen instansi dalam mengelola masukan, kritik, maupun keberatan dari masyarakat.*